

**TESIS**

**JARINGAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*  
DI KABUPATEN MAROS**

***POLICY NETWORK TO ACCELERATE STUNTING REDUCTION IN  
MAROS DISTRICT***

**RISKA ADELYA**

**E012211012**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

**JARINGAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN  
STUNTING DI KABUPATEN MAROS**

Disusun dan diajukan oleh

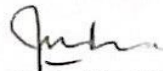
**RISKA ADELYA**

E012211012

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin  
pada tanggal **16 Agustus 2023**  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

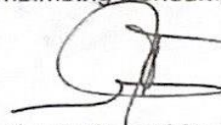
Menyetujui

Pembimbing Utama,



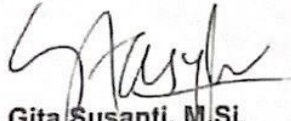
**Prof. Dr. Moh. Thahir Haning, M.Si.**  
NIP. 195705077 198403 1 001

Pembimbing Pendamping,



**Dr. Nur Indrayati Nur Indar M.Si.**  
NIP. 19641218 198803 2 001

Ketua Program Studi  
Ilmu Administrasi Publik,



**Dr. Gita Susanti, M.Si.**  
NIP. 19650311 199103 2 001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



**Prof. Dr. Ph.D. Sukri, S.IP, M.Si.**  
NIP. 19750818 200801 1 008

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riska Adelya

NIM : E012211012

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Menyatakan dengan yang sebenarnya bahwa Karya Tulis yang saya ajukan sebagai persyaratan menyelesaikan studi pada Program Magister Administrasi Publik Universitas Hasanuddin adalah benar-benar karya asli sendiri, bukan merupakan tulisan atau pemikiran orang lain. Saya akan bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari ada pihak yang merasa dirugikan baik secara pribadi maupun sanksi secara hukum yang berkaitan dengan karya tulis saya.

Makassar, 28 Mei 2023



Riska Adelya

## ABSTRAK

RISKA ADELYA. *Jaringan Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Maros* (dibimbing oleh Mohamad Thahir Haning dan Nur Indrayati Nur Indar).

Penelitian ini bertujuan menjelaskan dan menganalisis jaringan kebijakan pada percepatan penurunan stunting di Kabupaten Maros dengan menilai tujuh indikator yaitu: aktor, fungsi jaringan, struktur, pelembagaan, aturan main, hubungan kekuasaan, dan strategi aktor. Metode yang digunakan bersifat kualitatif. Pengumpulan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data terdiri atas: kondensasi data, penyajian data, dan pengambilan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) peran aktor dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting menunjukkan belum berhasil dinilai dari masih ada aktor yang belum berhasil menjalankan perannya di lapangan; (2) fungsi jaringan kebijakan digunakan sebagai alat koordinasi setiap aktor yang terlibat berhasil dalam menjalankan kerja sama, tetapi masyarakat belum menilai keberhasilan fungsi yang dijalankan oleh aktor; (3) stuktur jaringan kebijakan berhasil dalam pola keterkaitan sesuai dalam surat keputusan Bupati Maros terkait pembentukan tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Maros tahun 2022; (4) pelembagaan pada aktor dalam aturan berhasil sesuai dengan Peraturan Bupati Maros berdasarkan aturan Bupati Maros Nomor 473/KPTG/050.13/11/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Maros Tahun 2022, dan Peraturan Bupati Maros Nomor 87 Tahun 2021 terkait Peran Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Maros; (5) aturan bertindak berhasil sesuai alur dalam pelaksanaan pada jaringan kerjasama dengan SOP yang telah berlaku; (6) hubungan kekuasaan belum menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan program pada percepatan penurunan stunting dinilai dari masih kurang SDM dan tidak berkualitas; dan (7) strategi aktor belum berhasil dengan sosialisasi yang belum merata.

Kata kunci: jaringan kebijakan, kebijakan publik, stunting



## ABSTRACT

RISKA ADELYA. *The Policy Network of Stunting Reduction Acceleration at Maros Regency* (supervised by Mohamad Thahir Haning and Nur Indrayati Nur Indar).

The research aims to elaborate and analyse the policy network to accelerate the stunting reduction at Maros Regency by assessing seven indicators, namely: the actors, network functions, structure, institutionalization, rules of the game, power relations, and actors' strategies. The research used the qualitative method, and data were collected using the observation, interview techniques, and documentation. The data were processed comprising the data condensation, data presentation, and conclusion drawing. The research results indicate that: (1) the actors' roles in accelerating the stunting reduction have not been successful in assessing that there are still actors who have not succeeded in carrying out their roles in the field, (2) the function of the policy network is used as the instrument for coordinating each involved actor successfully in carrying out the collaboration, but the community has not yet assessed the success of the function carried out by the actor, (3) the structure of the policy network is successful in the linkage patterns in accordance with Maros Regent's decree regarding the formation of the team to accelerate the stunting reduction at Maros Regency in 2022, (4) the actors' institutionalization in the rule was successful in accordance with Maros Regent Regulation Number 473/KPTG/050.13/11/2022 concerning the formation of the team to accelerate the stunting reduction in 2022, and Maros Regent Regulation Number 87 of 2021 regarding Village and Village Administration Roles in the integrated stunting prevention and reduction at Maros Regency, (5) the rules for acting successfully in accordance with the implementation flow of the cooperation network with the valid Standard Operation Procedures (SOP), (6) the power relations have not shown success in implementing the program to accelerate the stunting reduction assessed by the lack of human resources and low quality; (7) the actor's strategy has not been successful due to the uneven socialization.

Key words: policy network, public policy, stunting



## KATA PENGANTAR

### ***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hambanya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan tesis yang berjudul **“Jaringan Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Maros”** dapat terselesaikan dengan baik yang sekaligus menjadi tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.

Sembah sujud dan kupersembahkan tesis ini terkhusus kepada orang tua tercinta bapak Ukkas dan Ibu Arni atas segala pengorbanan, kesabaran, doa, dukungan dan semangat yang tidak pernah ternilai hingga penulis mampu menyelesaikan studi, kiranya amanah yang diberikan kepada penulis tidak tersia-siakan. Terimakasih juga untuk adik saya dan keluarga yang senantiasa mendoakan kelancaran penulisan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis tidak terlepas dari berbagai macam kendala, hambatan dan kesulitan, akan tetapi atas segala usaha dan doa yang selalu dipanjatkan yang maha kuasa Allah SWT selama penyusunan tesis ini mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, nasihat dan saran yang diberikan oleh berbagai pihak, terutama kepada kedua pembimbing yang selalu memberikan arahan selama penulisan tesis ini sehingga dapat saya selesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan oleh berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis mengucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc Rektor Universitas

Hasanuddin yang memberikan kesempatan kepada saya sehingga mampu menyelesaikan Pendidikan di Universitas Hasanuddin.

2. Bapak Dr. Phil Sukri, S.IP., M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas beserta staf, atas segala bentuk pelayanan serta memberikan fasilitas didalam perkuliahan dan persetujuan mengadakan penelitian ini sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Dr. Suryadi Lambali, MA, Ketua program studi Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin sekaligus penguji ketiga saya yang senantiasa meluangkan waktunya untuk segala bentuk pelayanan yang dibutuhkan penulis serta memberikan nasihat dan motivasi pada penulisan tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. Moh. Thahir Haning, M.Si. selaku pembimbing pertama saya dengan tulus meluangkan waktu untuk memberikan arahan, masukan dan saran dalam proses penyusunan penelitian ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Dr. Nur Indrayati Nur Indar, M.Si. selaku pembimbing kedua yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing, arahan dan memberikan masukan, yang membangun demi kelancaran penulisan tesis ini.
6. Bapak Dr. Nurdin Nara, M.Si. selaku penguji pertama yang telah meluangkan waktu memberikan masukan dan saran untuk penulis sehingga tesis ini terselesaikan dengan baik.
7. Ibu Dr. Syahribulan, M.Si. selaku penguji kedua saya yang telah meluangkan waktunya dengan sabar memberikan nasihat dan perbaikan kepada saya untuk kelancaran tesis ini.
8. Seluruh dosen Pascasarjana Ilmu Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberikan segudang ilmu untuk penulis.
9. Bapak dan Ibu pegawai beserta staf akademik pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang dengan ikhlas

memberikan pelayanan untuk setiap pengurusan berkas pada proses penyelesaian studi di Magister Administrasi Publik.

10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3ADALDUKKB), Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PPK), Staf di Kecamatan Turikale, Staf di Kelurahan Aliiritengngae. dan Masyarakat Turikale yang telah membantu dalam mengambil data.
11. Teman-teman seperjuangan dalam penulisan tesis Magister Administrasi Publik Universitas Hasanuddin, Nur Alam Rezeki, Sri Wahyuni, dan Irma Nur yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan kepada saya sehingga penulisan tesis ini dapat selesai.
12. Teman-teman Pascasarjana Administrasi Publik Angkatan 2021 khususnya kelas reguler dan kelas bekerja serta teman-teman yang tidak sempat saya sebutkan yang sama-sama menimbah ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
13. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believeng in me. I wanna thank me for doing all these hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and trying to give more than I receive. I wanna thank me for trying to do more right than wrong, I wanna thank me for just being me all time.*

Penulis mendoakan semoga kebaikan atas segala bantuan yang telah diberikan, termasuk yang tidak sempat saya tuliskan namanya, mempunyai nilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT Aamiin Yaa Rabbal Alamiin.

Makassar, 21 Juni 2023

  
Riska Adelya



## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Surat Pernyataan Keaslian .....	iii
Abstrak.....	iv
<i>Abstract</i> .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	ix
Daftar Tabel .....	xii
Daftar Gambar .....	xiii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13

### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

A.	Konsep <i>Policy Network</i> .....	14
	B. Teori Ketergantungan Sumber Daya.....	35
	C. Tahap-Tahap Perumusan Kebijakan.....	38
	D. Masalah <i>Stunting</i> .....	39
	E. Kebijakan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .....	44
	F. Penelitian Terdahulu .....	46
	G. Kerangka Konsep.....	53

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	56
B. Lokasi Penelitian .....	56
C. Sumber Data .....	57
D. Teknik Pengumpulan Data .....	58

E. Informan Penelitian .....	58
F. Fokus Penelitian.....	60
G. Teknik Analisis Data.....	62
H. Pengecekan Validasi Temuan.....	63

#### **BAB IV. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

A. Deskripsi Umum Kabupaten Maros.....	65
B. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros .....	68
C. Dinas Kesehatan Kabupaten Maros.....	74
D. Dinas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Maros .....	75
E. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Maros.....	78
F. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Maros.....	80
G. Kecamatan Turikale Kabupaten Maros .....	83
H. Kelurahan Alliritengae Kabupaten Maros .....	85
I. <i>Stunting</i> di Kabupaten Maros .....	87

#### **BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	93
1. Aktor .....	93
2. Fungsi Jaringan .....	100
3. Struktur .....	106
4. Pelembagaan.....	111
5. Aturan Bertindak .....	116
6. Hubungan Kekuasaan .....	123
7. Strategi Aktor .....	130
B. Pembahasan .....	136
1. Aktor .....	136
2. Fungsi Jaringan .....	139

3. Struktur .....	140
4. Pelembagaan.....	143
5. Aturan Bertindak .....	146
6. Hubungan Kekuasaan .....	148
7. Strategi Aktor .....	151

## **BAB VI. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	157
B. Saran.....	159

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>161</b>
----------------------------	------------

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu .....	49
Tabel 4.1 Data Status Gizi Balita .....	91
Tabel 5.1 Peran Aktor pada Jaringan Kebijakan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten Maros.....	138
Tabel 5.2 Deskripsi Pelembagaan Dalam Jaringan Kebijakan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten Maros .....	144
Tabel 5.3 Deskripsi Aturan Bertindak Pada Jaringan Kebijakan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten Maros .....	147
Tabel 5.4 Deskripsi Hubungan Kekuasaan Pada Jaringan Kebijakan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten Maros .....	150
Tabel 5.5 Deskripsi Strategi Aktor Dalam Jaringan Kebijakan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten Maros .....	153
Tabel 5.6 Hasil Capaian Indikator Jaringan Kebijakan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten Maros.....	155

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Prevalensi Angka <i>Stunting</i> Tahun 2018-2022 Sulawesi Selatan.....	5
Gambar 1.2 Kasus <i>Stunting</i> di Kabupaten Maros Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022.....	6
Gambar 1.3 Prevalensi Balita <i>Stunting</i> Kabupaten Maros Tahun 2018-2022.....	7
Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian .....	55
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Maros.....	67
Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	73
Gambar 5.1 Jaringan Aktor Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten Maros.....	137
Gambar 5.2 Hubungan Aktor .....	140
Gambar 5.3 Bagan Struktur Organisasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten Maros.....	142
Gambar 5.4 Hubungan Jaringan Dalam Pencegahan <i>Stunting</i> .....	146
Gambar 5.5 Hubungan Pengintegrasian Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten Maros.....	149
Gambar 5.6 Jaringan Strategi Aktor Pada Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten Maros.....	152

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pendekatan jaringan kebijakan memperkenalkan teori jaringan pada ilmu kebijakan. Teori jaringan didasari pada asumsi bahwa relasi para aktor itu bersifat saling bergantung satu sama lain (*interdependence*). Pada konsep jejaring kebijakan yaitu menganalisis hubungan antar jejaring kebijakan yang dapat diidentifikasi dan hasil kebijakan yang dibuat dari jejaring yang ada. Pada jaringan kebijakan sekelompok aktor atau organisasi yang terhubung satu sama lain karena ketergantungan sumber daya dengan tujuan bersama. Dalam makna yang lebih operasional, bisa dimengerti para aktor tidak mampu mencapai tujuan-tujuannya tanpa menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh actor lain. Keberadaan jejaring kebijakan ini menunjukkan semangat pemerintah daerah dalam membangun jaringan antar actor dalam perumusan kebijakan publik.

Dalam konteks jaringan kebijakan pada percepatan penurunan *stunting* sangat penting, saat ini *stunting* menjadi masalah nasional yang serius karena bisa mengganggu pembangunan Negara. Salah satu ancaman pada *stunting* yang serius yaitu terhadap kemampuan daya saing bangsa. *Stunting* merupakan permasalahan gizi kronis yang terjadi pada bayi di 1000 hari pertama kehidupan yang berlangsung lama. Hal itu menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak karena kurangnya dalam memberikan asupan gizi,

sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada tinggi badan anak lebih pendek (kerdil) dari standar usia pada umumnya. Pada percepatan penurunan *stunting* diperlukan kerjasama dalam penurunan angka *stunting*, dimana dalam aktor terdapat berbagai pemangku kepentingan yang saling bekerjasama dan berkoordinasi pada jaringan kebijakan serta masyarakat dalam mencapai tujuan program tersebut.

Masalah *stunting* di Indonesia merupakan persoalan krusial yang semestinya menjadi perhatian semua pihak, terutama Pemerintah. Dalam amandemen UUD 1945 pasal 28H ayat (1) dinyatakan "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan". Selanjutnya dalam pasal 34 ayat (3) amandemen ke-4 dinyatakan "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak". Hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia di Indonesia, hak setiap rakyat Indonesia untuk memperoleh perlindungan dari bahaya yang mengancam kesehatannya. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjaga kesehatan masyarakatnya terutama kasus *stunting* yang menjadi masalah serius di Indonesia.

Percepatan penurunan angka *stunting* di Indonesia di laksanakan oleh pemerintah dalam upaya untuk mengurangi penderita *stunting*, yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting*. Aturan tersebut menegaskan bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai pelaksana pada percepatan penurunan *stunting*. Adapun yang menjadi

ruang lingkup Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* juga dibentuk di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kelurahan/Desa. Dengan komitmen percepatan penurunan *stunting* Gubernur Sulawesi Selatan menerbitkan

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dan Peraturan Bupati Maros Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Maros.

Peraturan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) tentang perencanaan aksi nasional percepatan penurunan angka *stunting* Indonesia tahun 2021-2024 pada pasal (2) menjelaskan tujuan melakukan penguatan peran pelaksana dan sekretariat pelaksanaan tim dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* sesuai dengan tugas, melakukan penguatan regulasi/kebijakan strategis yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *stunting*, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat serta gotong royong dalam percepatan penurunan *stunting*.

Upaya mendorong sinkronisasi program percepatan penurunan *stunting* juga diatur dalam Permendagri No.31/2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020. Permendagri ini mengamanatkan pemerintah daerah agar memasukkan kegiatan percepatan penurunan *stunting* kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam memastikan intervensi lintas sektor pada percepatan penurunan *stunting*



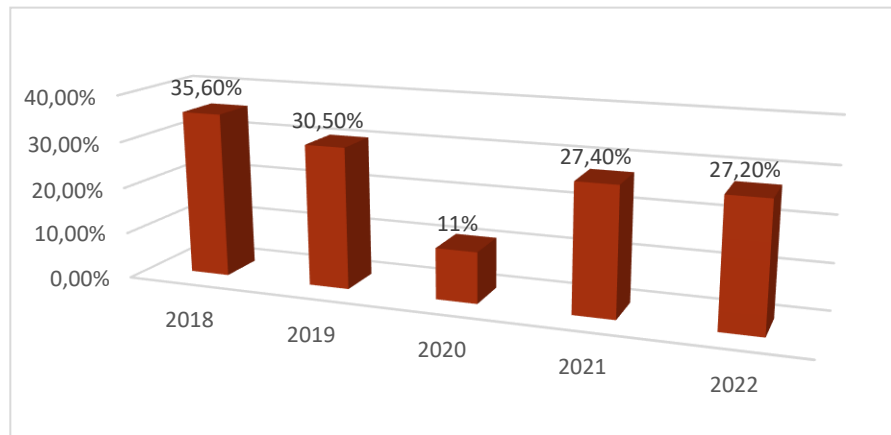
agar dapat dilaksanakan secara efektif di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota sampai tingkat Kelurahan/Desa.

Perluasan Kabupaten/Kota prioritas dalam keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor Kep.10/M.PPN/HK/02/2021 tentang penetapan perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* terintegrasi tahun 2022. Terdapat tambahan 154 Kabupaten/Kota yang menjadi prioritas di tahun 2022. Maka seluruh kabupaten/kota di Indonesia berjumlah 514 Kabupaten/Kota telah didorong untuk berkomitmen dalam pencegahan *stunting*. Pada keputusan Bupati Maros Nomor 924/KPTS/400/VI/2022 Tentang Penetapan Desa/Kelurahan Prioritas Pencegahan dan Penanganan *Stunting* di Kabupaten Maros 2022, yang menetapkan 30 Kelurahan/Desa prioritas pencegahan dan penanganan *stunting* di Kabupaten Maros Tahun 2022.

Angka *stunting* di Sulawesi Selatan di tahun 2022 masih cukup tinggi, pemerintah setempat menargetkan menekan angka *stunting* pada 2022 menjadi 21,59%. Secara nasional, angka prevalensi *stunting* di Indonesia juga masih cukup besar yaitu sebesar 24,4%. Sementara untuk Sulawesi Selatan berada pada posisi 27%. Sehingga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen besar untuk menurunkan angka *stunting*. Berikut prevalensi angka *stunting* Sulawesi Selatan di 5 (lima) tahun terakhir.

**Gambar 1.1**

**Prevalensi Angka *Stunting* Tahun 2018-2022 di Sulawesi Selatan**



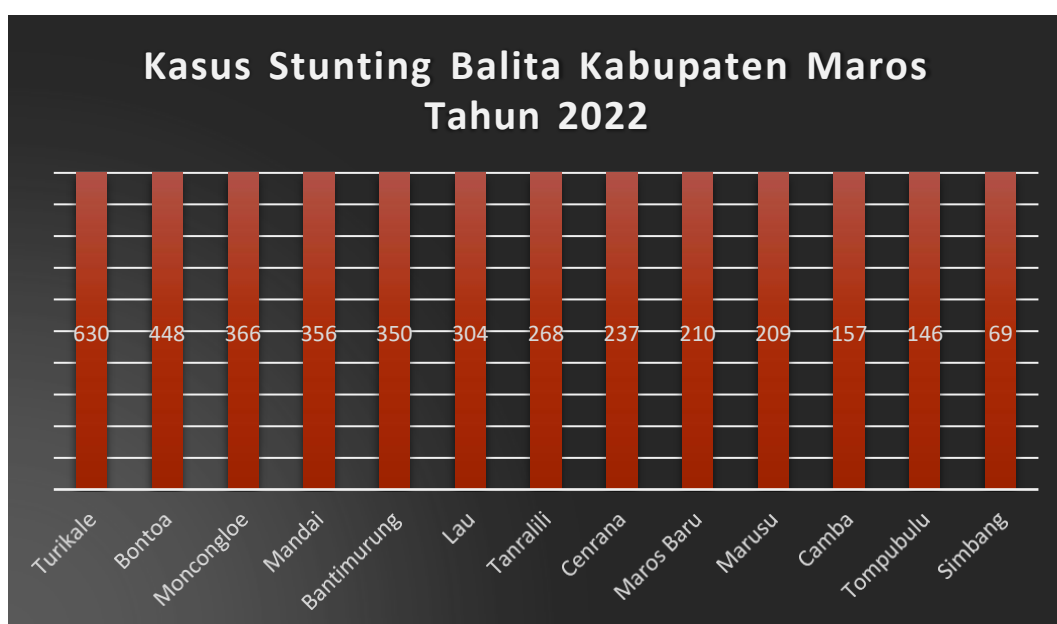
Sumber: BKKBN Sulawesi Selatan

Pada gambar diatas menjelaskan bahwa angka *stunting* di Sulawesi Selatan pada tahun 2018 mencapai 35,6% (Riskedas 2018), pada tahun 2019 angka *stunting* menurun hingga 30,5% (SSGBI 2019), sedangkan pada tahun 2020 dari data ePPGBM yaitu 11% angka *stunting*. Berdasarkan data Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2021, angka *stunting* di Sulawesi Selatan 27,4% sementara angka nasional mencapai 24,4%. Pada tahun 2022 berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) kementerian Kesehatan mencapai 27,2%, dengan demikian angka tersebut belum mencapai target nasional. Sulawesi Selatan menangkis tipis angka balita *stunting* sebesar 0,2% poin dari tahun sebelumnya, pada tahun 2021 tercatat prevalensi balita *stunting* sebesar 27,4%.

Salah satu penyebab faktor tingginya *stunting* di Indonesia adalah karena jarak antar kehamilan yang terlalu dekat. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan, jarak antara

kehamilan yang ideal adalah 2-3 tahun. Jika kurang dari 2 tahun maka bisa berdampak buruk bagi kesehatan ibu dan anak. Salah satu dampak secara nutrisi pada jarak kehamilan yang dekat adalah kesempatan untuk memberikan ASI eksklusif pada anak menjadi rendah. Memberikan ASI eksklusif menjadi langkah awal dalam menyelamatkan anak dari risiko terjadinya *stunting*. Hal tersebut di perelas oleh berita di media yang dilangsir oleh [makassar.sindonews](http://makassar.sindonews.com), pada 16 Maret 2022.

**Gambar 1.2**  
**Kasus Stunting Kabupaten Maros Berdasarkan Kecamatan**  
**Tahun 2022**



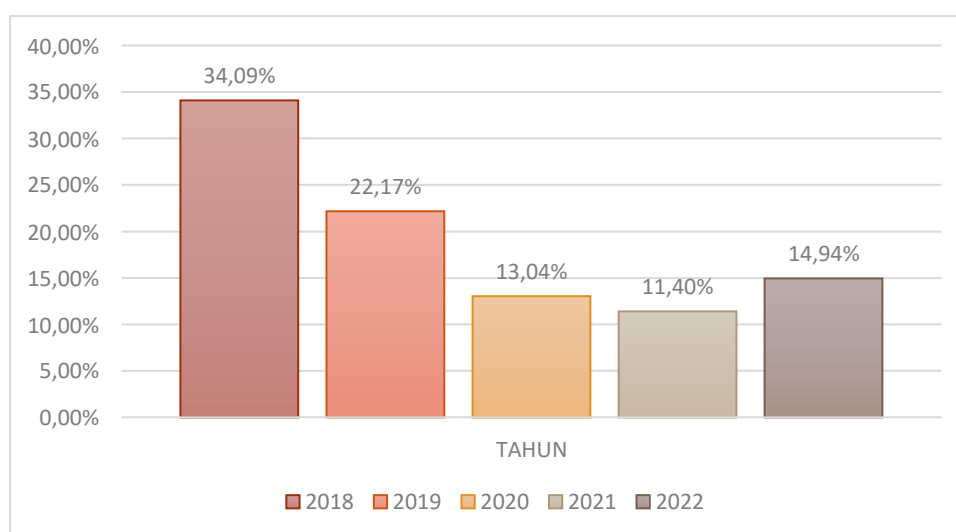
Sumber: Data e-PPGM Dinas Kesehatan Kabupaten Maros

Pada gambar diatas pada tahun 2022 prevalensi *stunting* di Kabupaten Maros berdasarkan kecamatan paling tinggi terdapat di Kecamatan Turikale kemudian Kecamatan Bontoa, sedangkan kasus terkecil Kecamatan Simbang. Kondisi *stunting* di Kabupaten Maros pada

tahun 2022 tidak memenuhi standar *World Health Organization (WHO)* dimana standar presentase maksimal *stunting* untuk suatu wilayah adalah 20% sedangkan angka prevalensi di tahun 2022 yaitu 30,1%. Berikut prevalensi balita *stunting* di Kabupaten Maros 5 (lima) Tahun terakhir.

**Gambar 1.3**

**Prevalensi Balita *Stunting* di Kabupaten Maros Tahun 2018-2022**



*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Maros 2022*

Terjadi peningkatan jumlah *stunting* di Kabupaten Maros pada tahun 2022 dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Pernyataan tersebut diperjelas oleh Kepala Dinas Kesehatan Maros Muhammad Yunus, bahwa saat ini jumlah kasus *stunting* mencapai 4.434 balita. Sementara tahun sebelumnya 3.378 kasus. Pada tahun 2022 jumlah *stunting* mencapai 4.434 atau 14,94% dari 29.684 balita yang diperiksa. Sementara pada tahun 2021 yakni 3378 kasus atau 11,40% dari 30.584 balita yang diperiksa, dan pada tahun 2020, jumlah *stunting* berkisar 3.812 *stunting* atau 13,04% dari 29.231 balita yang diperiksa, data berdasarkan RPJMD Kabupaten Maros

Tahun 2022. Jumlah kasus *stunting* tertinggi berada di Kecamatan Turikale yaitu disebabkan sasaran yang banyak dan partisipasi masyarakat yang lebih bagus. Sesuai data jumlah kasus *stunting* di Kecamatan Turikale terdapat 630 balita, di Kecamatan Turikale memiliki 7 (Tujuh) Kelurahan yaitu Adatongeng, Alliritengae, Boribellaya, Pettuadae, Raya, Taroad, dan Turikale.

Dalam penurunan *stunting* pemerintah harus membangun jaringan antar aktor dengan masyarakat demi mencapai tujuan suatu program. Pada proses percepatan penurunan *stunting* melibatkan beberapa aktor yaitu sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3ADALDUKKB)
2. Dinas Kesehatan
3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA)
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK),
6. TPPS Tingkat Kecamatan,
7. TPPS Tingkat Kelurahan,
8. Masyarakat yang terdampak *stunting*.

Pelaksanaan Percepatan Penurunan *stunting* dengan kelompok sasaran yaitu meliputi remaja, Ibu hamil, Ibu menyusui/melahirkan, dan anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh Sembilan) bulan. Dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat

Kabupaten/Kota hingga Kelurahan/Desa yaitu memiliki tugas mengoordinasikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*. Pada Tim tingkat Kabupaten yaitu terdiri atas perangkat daerah dan pemangku kepentingan (termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) sedangkan tim tingkat Kelurahan/Desa yaitu Tenaga Kesehatan (mencakup Bidan, Tenaga Gizi, Petugas Lapangan Keluarga Berencana, TP-PKK, Kader Pembangunan Manusia dan unsur masyarakat lainnya).

Beberapa upaya pemerintah Kabupaten Maros dalam percepatan penurunan *stunting* seperti membuka kegiatan Penguatan Kemitraan Kampung KB Dalam Rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Maros. Di tahun 2022 telah terbentuk 24 Kampung KB di Kabupaten Maros meskipun Kampung KB belum merata di setiap Kecamatan, Pemerintah Kabupaten Maros akan terus berupaya untuk seluruh Kelurahan/Desa Kabupaten Maros memiliki Kampung KB. Sejalan dengan dibentuknya program Dapur Sehat Atasi *Stunting* (DAHSAT) diharapkan menjadi salah satu solusi pendukung pada percepatan penurunan *stunting*. DAHSAT diolah oleh masyarakat setempat menggunakan bahan pangan lokal dari wilayah kampung itu sendiri sehingga selain memenuhi gizi juga diharapkan meningkatkan *income* perekonomian masyarakat setempat dan juga diharapkan dapat membantu upaya pencegahan *stunting* di tingkat Kelurahan/Desa.

Berdasarkan penelusuran lapangan dengan berkunjung ke masyarakat yaitu terbilang masih rendah pada kegiatan posyandu.

Kegiatan sosialisasi *stunting* dilakukan dalam bentuk penyuluhan. Dari data sekunder yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Maros ditemukan bahwa *stunting* di determinasi oleh masalah sosiologis masyarakat seperti, kurangnya pengetahuan ibu, hilangnya perhatian lingkungan terhadap ibu hamil, masih kurang partisipasi masyarakat, hingga masih rendah pengetahuan terkait pentingnya pencegahan *stunting*.

Sejalan dengan pernyataan yang diutarakan oleh Mantan Kepala Puskesmas Bantimurung pada berita di media yang dilangsir oleh *makassar.sindonews*. yang menyatakan jumlah kasus *stunting* tertinggi berada di Kecamatan Turikale yaitu sesuai data jumlah kasus *stunting* di Kecamatan Turikale terdapat 630 balita. Penyebab meningkatnya jumlah *stunting* yaitu partisipasi masyarakat untuk membawa anaknya ke posyandu masih rendah. Kurangnya pemeriksaan yang dilakukan pada posyandu yang menyebabkan juga kurangnya pemberian obat maupun suplemen pada balita dan ibu hamil yang menjadi penyebab kenaikan angka *stunting* di Kecamatan Turikale.

Pernyataan diatas disimpulkan Masyarakat belum paham terkait *stunting* tepatnya di Kabupaten Maros. Pada dasarnya *stunting* pada balita tidak bisa disembuhkan, tapi dapat dilakukan upaya untuk perbaikan gizi guna meningkatkan kualitas hidupnya. Pencegahan *stunting* harus dilakukan sejak dini, bahkan sejak masa kehamilan. Oleh karena itu, posyandu menjadi wadah untuk mengedukasi masyarakat tentang *stunting* dan kesehatan ibu dan anak. Kesadaran masyarakat untuk memantau tumbuh kembang anak belum merata di semua wilayah, sehingga kader

posyandu perlu berperan aktif dalam mengukur tumbuh kembang anak. Eksekutif secara aktif mengundang orang tua dan mendorong mereka untuk datang ke posyandu secara teratur.

Dengan menggunakan jaringan antar aktor dalam membangun kerjasama sehingga pada permasalahan dalam percepatan penurunan *stunting* mampu menurunkan angka *stunting* di Kabupaten Maros, Kehadiran aktor yang terlibat ini diharapkan mampu meminimalisir masalah dalam percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Maros. Dalam perspektif jaringan, pemerintah tidak lagi bertindak sebagai aktor tunggal (*single actor*) baik pada tahap perumusan maupun pada tahap implementasi kebijakan, akan tetapi pemerintah harus mampu membangun jaringan dengan aktor-aktor lainnya.

Aktor yang terlibat dalam percepatan penurunan angka *stunting* di Kabupaten Maros, jika dinilai berdasarkan jaringan kebijakan beberapa belum efektif dapat dinilai dari kenaikan angka *stunting* di tahun 2022 dengan angka *stunting* 14,94% sedangkan di tahun 2021 angka *stunting* 11,40%. Terjadinya kenaikan angka *stunting* tahun ini Kabupaten Maros di posisi peringkat kedua tertinggi di Sulawesi Selatan setelah Kabupaten Jeneponto sebagai peringkat pertama.

Permasalahan dalam program percepatan penurunan *stunting* diperlukan konsep jaringan dalam penyelesaian masalah tersebut, dengan harapan dapat membantu pemerintah Kabupaten/Kota Maros dalam penurunan angka *stunting*. Untuk mewujudkan kesejahteraan pada ibu dan anak yang mengalami gagal tumbuh dalam mewujudkan prevalensi angka



*stunting* sesuai ketetapan pemerintah. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “***Jaringan Kebijakan Percepatan Penurunan Angka Stunting di Kabupaten Maros***”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas dari latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Aktor Jaringan Kebijakan Pada Percepatan Penurunan Angka *Stunting* di Kabupaten Maros?
2. Bagaimana Fungsi Jaringan Kebijakan Pada Percepatan Penurunan Angka *Stunting* di Kabupaten Maros?
3. Bagaimana Struktur Jaringan Kebijakan Pada Percepatan Penurunan Angka *Stunting* di Kabupaten Maros?
4. Bagaimana Pelembagaan Jaringan Kebijakan Pada Percepatan Penurunan Angka *Stunting* di Kabupaten Maros?
5. Bagaimana Aturan Bertindak Jaringan Kebijakan Pada Percepatan Penurunan Angka *Stunting* di Kabupaten Maros?
6. Bagaimana Hubungan Kekuasaan Jaringan Kebijakan Pada Percepatan Penurunan Angka *Stunting* di Kabupaten Maros?
7. Bagaimana Strategi Jaringan Kebijakan Pada Percepatan Penurunan Angka *Stunting* di Kabupaten Maros?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas sehingga penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan Mendeskripsikan Peran Aktor Jaringan Kebijakan Dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Maros.
2. Menganalisis dan Mendeskripsikan Fungsi Jaringan Kebijakan Dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Maros.
3. Menganalisis dan Mendeskripsikan Struktur Jaringan Kebijakan Dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Maros.
4. Menganalisis dan Mendeskripsikan Pelembagaan Jaringan Kebijakan Dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Maros.
5. Menganalisis dan Mendeskripsikan Aturan Bertindak Jaringan Kebijakan Dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Maros.
6. Menganalisis dan Mendeskripsikan Hubungan Kekuasaan Jaringan Kebijakan Dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Maros.
7. Menganalisis dan Mendeskripsikan Strategi Jaringan Kebijakan Dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Maros.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang telah dipelajari, terutama dimensi jaringan kebijakan dalam penanganan suatu program.
2. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pihak yang memiliki kepentingan didalam kebijakan publik.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### **A. Konsep *Policy Network***

Konsep jejaring kebijakan (*policy networks*) menganalisis hubungan antara jejaring-jejaring kebijakan yang dapat diidentifikasi dan hasil-hasil kebijakan yang dibuat, melalui pemahaman susunan kelembagaan dari jejaring yang ada, dimana jenis-jenis kebijakan berhubungan dengan jenis-jenis jejaring tertentu. Jaringan kebijakan lazim di seluruh lingkaran akademis barat, dapat dilihat sebagai pendekatan analitik, yang memperkenalkan teori jaringan ke dalam ilmu kebijakan. Diperkirakan bahwa pendekatan ini dapat menggantikan analisis kebijakan, manajemen publik baru serta institusionalisme baru. Secara umum, jaringan kebijakan mencakup dua asal teoretis yaitu pertama adalah teori organisasi sosial pada 1950-an dan lainnya adalah doktrin tentang diskusi kekuasaan bidang politik (Klijn & Koppenjan, 2000).

Ide dan konsep *policy networks* digunakan untuk menggambarkan pola hubungan saling ketergantungan antara aktor-aktor yang terlibat dalam formulasi dan definisi kebijakan publik. Ketergantungan antara beberapa aktor dalam *network* tersebut dikarenakan ketidakmampuan mereka untuk mencapai atau memenuhi tujuan secara sendiri, melainkan memerlukan sumber daya yang lain yang dimiliki oleh pihak lain di luar dirinya untuk bekerjasama (Kickert dkk., 1997).

Jaringan kebijakan diperlukan untuk menjawab masalah sosial yang bersifat kompleks. Kebijakan ini tidak tepat menempatkan *target group* hanya sebagai objek kebijakan melainkan harus menjadikannya sebagai subjek atau pelaku dalam proses perumusan kebijakan tersebut. Konsep jaringan kebijakan menghubungkan kebijakan public dengan konteks strategis dan terlembaganya: jaringan publik, semi-publik, dan actor swasta yang berpartisipasi dalam bidang kebijakan tertentu. Konsep ini baru dalam arti bahwa ia menggabungkan wawasan dari ilmu kebijakan, yang berfokus pada analisis proses kebijakan public, dengan ide-ide dari ilmu politik dan teori organisasi tentang distribusi kekuasaan dan ketergantungan, fitur organisasi dan hubungan organisasi. Sebagai jaringan kebijakan fenomena empiris dapat ditemukan di hampir setiap bidang kebijakan. (kriket, klijin, koppejan:1997).

Istilah jaringan kebijakan didefinisikan sebagai "sekelompok aktor atau organisasi yang terhubung satu sama lain karena ketergantungan sumber daya melalui tindakan kolektif". Berdasarkan tipologi (Marsh dan Rhodes) jaringan kebijakan diklasifikasikan menjadi lima jenis dalam hal jumlah peserta, frekuensi interaksi, kontinuitas, tingkat konsensus, sifat hubungan, distribusi sumber daya dan keseimbangan kekuasaan: komunitas kebijakan; jaringan profesional; jaringan antar pemerintah; jaringan produsen dan jaringan isu (Marsh & Rhodes, 1992). Selain itu, sumber daya jaringan kebijakan juga dapat diklasifikasikan ke dalam lima jenis: otoritas, keuangan, legitimasi, informasi dan organisasi (Marsh & Rhodes, 1992).

Jaringan kebijakan (*policy network*) digambarkan dalam beberapa kategori. Pertama, dideskripsikan sebagai aktor-aktor. Kedua, hubungan (*linkages*) di antara aktor-aktor. Ketiga, batas atau *boundary* (Kenis & Schneider, 1991 dalam Carlsson, 2000). Sementara Rhodes menggunakan istilah jaringan untuk menggambarkan beberapa pihak yang terkait dalam rangka pemberian pelayanan. Jaringan-jaringan ini dibuat oleh organisasi-organisasi tersebut dengan saling mempertukarkan sumber daya (misalnya uang, informasi, keahlian) untuk mencapai tujuannya, untuk memaksimalkan pengaruh mereka terhadap hasil, dan untuk menghindari ketergantungan pada pihak lain dalam menjalankan peranannya.

### **1. Perspektif Jaringan**

Konsep *Network* belakangan ini menjadi sebuah konsep yang banyak dibicarakan berbagai pihak, baik oleh pemerintah, ilmuwan (social dan alam), praktisi bisnis, maupun oleh masyarakat secara umum. Dalam ilmu politik, kata “jaringan” sering digunakan baik oleh politisi maupun akademisi untuk menjelaskan pentingnya kehadiran *stakeholders* dari berbagai *background* dalam membicarakan dan memutuskan sebuah keputusan politik yang biasa kita kenal dengan istilah kebijakan publik.

Istilah jaringan sering digunakan untuk menggambarkan kelompok dari berbagai jenis aktor yang terkait bersama dalam kehidupan politik, sosial atau ekonomi. Jaringan mungkin terstruktur secara longgar tetapi masih mampu menyebarkan informasi atau terlibat dalam aksi kolektif. Karya akademis di jaringan seringkali tidak jelas atau abstrak, atau keduanya (Peterson dan O'Toole Jr. 2001).

Argument utama perspektif jaringan yaitu bahwa tata Kelola pemerintahan yang baik akan terwujud apabila didukung adanya jaringan (*network*) yang konstruktif (Rhodes, 2007:1246). Perspektif ini mengartikan *governance* sebagai pengelolaan jaringan (*governance is about managing network*). Proses pemerintahan dipandang sebagai operasionalisasi jaringan dari kompleksitas actor dan organisasi yang saling berinteraksi, dengan karakteristik adanya interelasi antar berbagai actor yang berbeda tujuan namun terjadi saling ketergantungan (interdependensi) dan pertukaran sumber daya (Rhodes, 1997a; Klijin 1997).

Terkait dengan transparansi pemerintahan, pendekatan jaringan memiliki kelebihan pada aspek relasi interdependensi antar actor yang disertai pertukaran sumber daya dalam upaya pencapaian tujuan bersama (Klijin, 1997). Dengan adanya jaringan yang efektif maka akan berlangsung Kerjasama semua actor untuk saling melengkapi kebutuhan sumber daya seperti sarana prasarana, teknologi informatika, finansial, dan keterampilan personel. Selain itu, melalui jaringan para aktor yang terlibat bisa menyingkirkan ego institusional masing-masing yang kontradiktif dengan prinsip keterbukaan. Dengan demikian, asumsi yang muncul berdasarkan perspektif jaringan adalah kualitas transparansi pemerintahan akan meningkat apabila didukung adanya jaringan yang konstruktif. Begitu pula sebaliknya, transparansi pemerintahan akan sulit terwujud apabila jaringan tidak berlangsung dengan baik dan efektif. Keberadaan jejaring kebijakan ini menunjukkan semangat pemerintah daerah dalam membangun jaringan antar actor dalam perumusan kebijakan publik.

Asumsi diatas terjadi di St. Johns County, Florida, dimana pemerintahnya berhasil dalam pelaksanaan transparansi pemerintahan karena didukung adanya jaringan kolaborasi. Pemerintah tingkat local di Amerika Serikat ini memperoleh penghargaan *Sunny Award* karena berhasil memfasilitasi keterlibatan aktif warga negara dan pemerintah melalui situs resminya. Informasi yang disediakan selalu diperbarui akurat dan actual karena ada Kerjasama yang baik antar Lembaga Pemerintah dan non pemerintah terutama dalam hal komunikasi dua arah dan suplai data. Berbeda dengan hasil studi (Guha dan Chakrabarti, 2014:9) tentang penyediaan informasi public melalui *e-government* di India, diketahui bahwa program Gyandoot, Bhoomi dan Akshaya tidak berjalan sesuai tujuan karena lemah dalam membangun relasi jaringan. Program-program tersebut tidak terlembagakan dengan baik disebabkan minimnya keterlibatan actor kunci serta rendahnya dukungan dari mitra kerja.

Dari penerapan transparansi diatas memperlihatkan bahwa aspek jaringan menjadi satu penentu dalam keberhasilan transparansi. Secara hipotetikal, jaringan perlu dibangun dan diperkuat dalam penerapan transparansi pemerintahan, karena adanya keterlibatan pemangku kepentingan bervariasi, melalui interelasi interdependensi sehingga dapat mewujudkan informasi public yang akurat dan actual. Hal ini yang kemudian menjadi menarik untuk dikaji lebih jauh mengenai eksistensi dan operasionalisasi jaringan dalam konteks penerapan transparansi di Indonesia, khususnya di level pemerintahan daerah. (Stoker, 2004). Karakteristik ini mengilhami pemikiran tentang jaringan sebagai cara

mencapai tujuan yang lebih baik, karena jika dilakukan sendiri akan menjadi sulit karena adanya keterbatasan. Penggunaan jaringan dalam konteks relasi yang setara dikarenakan telah bergesernya paradigma dari hirarki menjadi *network*.

Seperti pandangan (Kickert dkk, 1997:9-10) bahwa ide yang kuat dalam perspektif jaringan adalah sebuah Lembaga harus mampu mengembangkan Kerjasama dengan aktor-aktor yang mempunyai kepentingan sama dan mensinergikan tersebut dalam relasi setara demi pencapaian yang lebih baik. Jaringan dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk koordinasi antar pelaku yang setara dimana masing-masing actor mengikatkan diri dengan yang lain berdasarkan pilihan independent mereka. Dari apa yang dikemukakan Rhodes (2007) dan Kickert dkk (1997), memperlihatkan suatu relasi teoritis yang terkandung di dalamnya yaitu kegagalan mengelola jaringan akan mengarah pada kegagalan tata pemerintahan (*governance*).

Menurut pandangan pakar teori jaringan, pendekatan normatif memusatkan perhatian terhadap kultur dan proses sosialisasi yang menanamkan (*internationalization*) norma dan nilai ke dalam diri aktor. Menurut pendekatan normatif, yang mempersatukan orang secara bersama adalah sekumpulan gagasan bersama. Pakar teori jaringan menolak pandangan demikian dan menyatakan bahwa orang harus memusatkan perhatian pada pola ikatan obyektif yang menghubungkan anggota masyarakat (Mizruchi, 1994 dalam Ritzer dan Goodman, 2014). Willman mengungkapkan pandangan "*Analisis jaringan lebih ingin mempelajari*



*keteraturan individu atau kolektivitas berperilaku ketimbang keteraturan keyakinan tentang bagaimana mereka seharusnya berperilaku. Karena itu pakar analisis jaringan mencoba menghindarkan penjelasan non struktural yang memperlakukan proses sosial sama dengan penjumlahan ciri pribadi aktor individual dan norma yang tertanam". (Wellman, 1983:162 dalam Ritzer dan Goodman, 2014).*

Setelah menjelaskan apa yang bukan menjadi sasaran perhatiannya, teori jaringan lalu menjelaskan sasaran perhatian utamanya, yakni pola obyektif ikatan yang menghubungkan anggota masyarakat (individual dan kolektivitas), Wellman mengungkapkan sasaran perhatian utama teori jaringan bahwa "*Analisis jaringan memulai dengan gagasan sederhana namun sangat kuat, bahwa usaha utama sosiolog adalah mempelajari struktur social. Cara paling langsung mempelajari struktur social adalah menganalisis pola ikatan yang menghubungkan anggotanya. Pakar analisis jaringan menelusuri struktur bagian yang berada di bawah pola jaringan biasa yang sering muncul ke permukaan sebagai system social yang kompleks. Aktor dan prilakunya dipandang sebagai dipaksa oleh struktur social ini. Jadi, sasaran perhatian analisis jaringan bukan pada actor sukarela, tetapi pada paksaan structural". (Wellman, 1983:156- 157 dalam Ritzer dan Goodman, 2014).*

Ciri khas teori jaringan adalah pemusatan perhatiannya pada struktur mikro hingga makro. Artinya, bagi teori jaringan, aktor mungkin saja individu, tetapi mungkin pula kelompok, perusahaan dan masyarakat. Hubungan dapat terjadi di tingkat struktur sosial skala luas maupun di

tingkat yang lebih mikroskopik. Granoveter (1985) melukiskan hubungan di tingkat mikro itu seperti tindakan yang “melekat” dalam hubungan pribadi konkret dan dalam dalam struktur (Jaringan) hubungan itu. Hubungan ini berlandaskan gagasan bahwa setiap aktor (individu atau kolektivitas) mempunyai akses berbeda terhadap sumber daya yang bernilai (kekayaan, kekuasaan, informasi). Akibatnya adalah bahwa system yang terstruktur cenderung terstratifikasi, komponen tertentu tergantung pada komponen yang lain.

Lehmbruch (1984), menggunakan istilah *network* untuk menghubungkan pihak-pihak ke arah pemusatan korporasi. Berbagai preferensi ahli yang menjadi landasan di gunakannya istilah *network*, maka disimpulkan bahwa konsep jaringan berfokus pada hubungan antara *state* dan *non-state* (industry, NGO, interests group, CSO) dan pola hubungan tersebut didasarkan pada *interdependence* atau saling ketergantungan.

Hubungan relasional antar berbagai aktor baik individu maupun kolektif ini utamanya disebabkan adanya ketergantungan terhadap sumber daya (Menzel, 1987). Umumnya organisasi berusaha untuk mereduksi ketidakpastian (*organizational uncertainties*) yang mereka hadapi dengan cara menjalin relasi-relasi dengan pihak lain Thompson (1967). Hal ini menyebabkan konsep jaringan memiliki keunggulan mengatasi problem kelangkaan sumber daya yang merupakan salah satu bagian dari ketidakpastian yang dihadapi organisasi-organisasi.

## 2. Perspektif Jaringan Kebijakan

Rhodes mendefinisikan jaringan kebijakan sebagai satu dari kumpulan konsep yang berfokus pada hubungan dengan pemerintah dan ketergantungan pada aktor-aktor negara maupun aktor masyarakat lainnya. Oleh karena itu, Rhodes menekankan bahwa hubungan struktural antara lembaga-lembaga politik sebagai elemen penting dalam jaringan kebijakan dari pada hubungan interpersonal antar individu dalam lembaga-lembaga tersebut.

Analisis jaringan kebijakan dimulai dengan tiga asumsi dasar. *Pertama*, modern pemerintahan seringkali tidak hierarkis. Beberapa solusi kebijakan hanya dipaksakan oleh otoritas publik. Tata kelola melibatkan mutualitas dan saling ketergantungan antara aktor publik dan non publik, serta antara berbagai jenis aktor publik, tidak terkecuali di federal atau quasi federal polities seperti Uni Eropa. *Kedua*, proses kebijakan harus dipilah-pilah agar dapat dipahami karena hubungan antar kelompok dan pemerintah berbeda-beda antar bidang kebijakan (Rhodes 1997: 32). Dengan kata lain, tidak masuk akal untuk berbicara secara umum tentang negara kuat atau negara korporat apalagi organisasi internasional (IO) kuat atau lemah karena negara dan IO jauh lebih kuat mempengaruhi kepentingan di beberapa sektor kebijakan daripada yang lain. *Ketiga*, Pemerintah pada akhirnya tetap bertanggung jawab atas pemerintahan, tetapi itu bukan keseluruhan cerita. Sebelum kebijakan ditetapkan oleh aktor politik terpilih, pilihan kebijakan dibentuk dan disempurnakan dalam tawar-menawar antara beragam aktor, termasuk beberapa non-pemerintah,

yang semuanya memiliki kepentingan dalam kebijakan apa yang dipilih. Jaringan kebijakan dapat mempersempit pilihan dan menggeser agenda dengan mengejar strategi yang menghasilkan kekuatan politik dan ekonomi baru (Thatcher 1998: 406).

Jejaring kebijakan akan terwadahi dalam organisasi. Organisasi ini sering disebut sub sistem kebijakan. *Howlett* dan *Ramesh* (1995). Sub sistem kebijakan dalam perumusan kebijakan terbentuk tatkala semua yaitu pihak pemimpin dan yang dipimpin, antara berbagai kelompok politik, masyarakat dan swasta berpartisipasi dan terjadi interaksi di antara partisipan atau aktor. Kegiatan saling mempengaruhi di antara para aktor akan membentuk suatu parameter-parameter yang relatif stabil. Parameter-parameter yang relatif stabil dibatasi oleh sistem nilai atau faktor internal dan eksternal aktor. Perubahan interaksi antar aktor yang disebabkan perubahan sistem nilai akan berakibat pada perubahan sub sistem kebijakan. (*Parsons,2008*) diadaptasi dari *Sabatier*, 1988, 1991).

*Sabatier* (1993) meneliti suatu jejaring kebijakan dan menamakan *Advocacy Coalition* yaitu sekelompok pengambil kebijakan dalam subsistem kebijakan. Aktor dari *advocacy coalition* terdiri dari pelaku-pelaku dari sejumlah institusi swasta dan pemerintah dalam semua level organisasi pemerintah yang berhubungan atas dasar kepercayaan pada pencapaian tujuan. (*Howlett dan Ramesh,1995 :125*). Sistem kepercayaan yang melandasi hubungan diantara aktor terdiri atas 3 (tiga) tingkat kepercayaan, yaitu : 1) *Common belief* atau *deep/normative core*, suatu kepercayaan dan kesamaan persepsi pada tujuan kebijakan berdasarkan

kesamaan pengetahuan tentang masalah publik yang menarik perhatian aktor-aktor tersebut. Kepercayaan ini seringkali berkaitan dengan sifat dasar manusia baik sebagai individu maupun sebagai kolektif. Kepercayaan yang bersumber dari sifat dasar manusia, dalam kenyataan sangat sulit diubah; 2) *Core of belief system* yaitu sistem kepercayaan berdasarkan atas pandangan yang sama terhadap sifat alami kemanusiaan dan beberapa kondisi yang diinginkan manusia. Koalisi berlandaskan sistem kepercayaan ini sangat stabil persatuannya sulit dirubah; 3) *External factors* meliputi uang, keahlian, jumlah pendukung, legal otoritas, pendapat umum, teknologi, tingkat inflasi, nilai-nilai budaya. Sistem kepercayaan yang terbentuk dari faktor-faktor eksternal relatif mudah berubah.

*Policy networks* dideskripsikan oleh beberapa kategori. Pertama, sebagai aktor-aktor. Kedua, keterkaitan diantara aktor-aktor. Ketiga, *boundary* (batas). (Kenis & Schneider, 1991, dalam Suwitri, 2008). Dalam konteks *policy networks* analisis ditekankan bagaimana jaringan menentukan isu-isu yang akan dimasukkan ataupun dikeluarkan dari anggota kebijakan, membentuk perilaku dari para aktor, mengistimewakan kepentingan tertentu, dan bahkan mensubstitusi bentuk-bentuk privat dari pemerintah untuk akuntabilitas public.

Jaringan kebijakan mampu menstimulasi penguatan legitimasi kebijakan dan mampu megantisipasi potensi konflik yang akan terjadi ketika suatu kebijakan telah dirumuskan. Jaringan berbeda dengan organisasi berdasarkan pada tingkat formalisasi hubungan yang dibangunnya dan tipe koordinasinya. Dalam konteks jaringan, kekuasaan pusat (*power center*)

tidak menjadi bagian yang utama dan pola koordinasi yang terbangun tidak bersifat hirarkis (*hierarchical authority*) melainkan bersifat tawar-menawar dan negosiasi (*horizontal bargaining*). Hal ini menegaskan tak ada lagi proses pembuatan keputusan yang terpusat Heclo (1978), Hanf dan Scharpf (1997). Perspektif ini menjadi kritik terhadap konsepsi single aktor (*state*) yang selama ini mendominasi proses perumusan kebijakan publik. Dengan pola relasi seperti ini, kelompok-kelompok kepentingan terhadap suatu isu kebijakan memiliki akses dalam proses formulasi.

Selain itu jaringan kebijakan dianggap dapat memberikan adanya kemungkinan komunikasi antar aktor yang berbeda yang berkelanjutan atau *continuous*, jaringan terdiri dari organisasi formal, berbagai instansi-instansi pemerintah, aktivitas local dan kelompok dukungan internasional, kelompok ini akan berinteraksi satu dengan kelompok lainnya dalam sebuah program atau kebijakan pemerintah, (Mark, 1995: 108). Administrator sebagai pilar terdepan yang mengimplementasikan kebijakan publik sejatinya membutuhkan dukungan politik, legitimasi, informasi, dan partner koalisi. Sementara itu di saat yang sama kelompok-kelompok kepentingan memiliki hasrat akan akses terhadap proses perumusan dan implementasi kebijakan publik.

Jaringan kebijakan memfasilitasi koordinasi kepentingan public dan swasta, serta sumber daya, dalam hal ini dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan public. Rhodes (1997) dalam Adshead (2003) menyatakan bahwa studi jaringan kebijakan penting bagi 6 (enam) alasan utama, yaitu:

1. *They limit participation in the policy process* (mereka membatasi partisipasi dalam proses kebijakan);
2. *They define the roles of actors* (mereka mendefinisikan peran actor);
3. *They decide which issues will be included and excluded from the policy agenda* (mereka memutuskan masalah mana yang akan dimasukkan dan dikeluarkan dari agenda kebijakan);
4. *Through the rules of the game, they shape the behaviour of actors* (melalui aturan main, mereka membentuk perilaku actor);
5. *They privilege certain interests, not only by according them access but also by favouring their preferred policy outcomes* (mereka mengistimewakan kepentingan tertentu, tidak hanya dengan menurut mereka akses tetapi juga dengan mendukung hasil kebijakan pilihan mereka);
6. *They substitute private government for public accountability* (mereka mengganti pemerintah swasta dengan akuntabilitas publik).

Berbeda halnya dengan Rhodes, Kenis dan Schneider (1991) berpendapat bahwa jaringan kebijakan merupakan bentuk baru dari pemerintahan ditandai dengan dominasi hubungan informal, desentralisasi, dan horizontal (ibid: 131). Definisi ini memberikan penekanan bahwa proses kebijakan tidak sepenuhnya dan terstruktur eksklusif oleh pengaturan lembaga formal. Oleh karena itu, organisasi pemerintah tidak lagi menjadi aktor kemudi sentral dalam proses kebijakan. Kenis dan Scheider, berpendapat munculnya konsep jaringan ini dalam perkembangan konseptual dan metodologis untuk mentransformasi empiris dari proses

pembuatan kebijakan pada periode pasca perang. Mereka mengamati ruang lingkup yang meningkat, desentralisasi, fragmentasi, ICT (meningkatkan pentingnya informasi) dan transnasionalisasi dalam pembuatan kebijakan publik.

Model Rhodes dari jaringan kebijakan menggunakan istilah 'komunitas kebijakan' yang berarti jaringan kebijakan yang sangat terintegrasi dan berpikiran tunggal (Rhodes 1997; 1990; Marsh 1998; Marsh dan Rhodes 1992). Rhodes menggunakan istilah jaringan untuk menggambarkan beberapa pihak yang terkait dalam rangka pemberian pelayanan. Jaringan-jaringan ini dibuat oleh organisasi-organisasi tersebut dengan saling mempertukarkan sumber daya (misalnya uang, informasi, keahlian) untuk mencapai tujuannya, untuk memaksimalkan pengaruh mereka terhadap hasil, dan untuk menghindari ketergantungan pada pihak lain dalam menjalankan peranannya.

Model jaringan kebijakan Rhodes 1997 telah digunakan lebih sering daripada model lainnya dalam studi tata kelola UE (Peterson 1995a; Daugbjerg 1999; Peterson dan Bomberg 1999; Bomberg 1998; Falkner 1999; 2000). Sederhananya, model ini mengasumsikan bahwa tiga variabel kunci menentukan jenis jaringan kebijakan apa yang ada di sektor tertentu:

1. Stabilitas relatif dari keanggotaan jaringan: apakah aktor yang sama cenderung mendominasi pengambilan keputusan dari waktu ke waktu atau keanggotaannya berubah-ubah dan bergantung pada kebijakan tertentu masalah yang sedang dibahas.



2. Ketidakjelasan relatif jaringan: apakah ada keanggotaan rahasia yang mengecualikan orang luar atau sangat dapat ditembus oleh berbagai aktor dengan tujuan yang berbeda.
3. Kekuatan ketergantungan sumber daya: apakah anggota jaringan sangat bergantung satu sama lain untuk sumber daya yang berharga seperti uang, keahlian, dan legitimasi atau apakah sebagian besar aktor mandiri dan dengan demikian relatif independen satu sama lain.

### **3. Dimensi kebijakan**

Secara umum, terdapat tiga dimensi dalam pembuatan kebijakan publik, yakni dimensi isi/substansi/konten kebijakan, dimensi proses kebijakan, dan dimensi konteks kebijakan. Dimensi proses berkaitan dengan proses yang harus dilakukan untuk mengatasi atau mencapai tujuan kebijakan publik, sedangkan konteks berkaitan dengan situasi dimana kebijakan itu berlangsung (Santoso, 2010: 57). Purwo Santoso (2010) memperjelas bahwa dalam persoalan analisis kebijakan, bahwa tiga dimensi itu dapat dipakai secara berimbang, namun pada prakteknya hanya menonjolkan satu dimensi tergantung pada persoalan dan aktor kebijakan itu. Semisal tipe politisi akan lebih mengutamakan dimensi proses karena meyakini konteks dapat disiasati untuk mencapai isi yang dikehendaki. Analisis politisi akan cenderung melihat segala sesuatu bersifat mungkin untuk direalisasikan dengan melalui proses-proses menuju terealisasinya isi kebijakan tertentu.

Salah satu hal utama yang perlu disadari adalah proses bukan hanya dipahami sebagai metode prosedural birokratis semata. Dimensi proses

bukan hanya merujuk pada tata aturan prosedural tentang perundang-undangan yang harus dilalui, atau bagaimana bagian-bagian simpul kecil saling bergerak untuk menuju pencapaian tertentu, tapi di dalam dimensi proses juga ada model konflik yang berlangsung. Dalam model konflik ini, proses dipahami sebagai pertarungan kepentingan antar berbagai kelompok pembuat kebijakan (Nugroho, 2008: 267-285 dalam Santoso, 2010: 64-65).

Keberhasilan suatu program atau kebijakan diperlukan suatu indikator dalam mengukur keberhasilan program atau kebijakan tersebut. Dalam perspektif jaringan kebijakan, Waarden Frans Van (1992), mengembangkan teori proses perumusan kebijakan berbasis jaringan dengan dimensi-dimensi utama pada jaringan kebijakan (*policy network*). Dimensi-dimensi jaringan kebijakan ini dapat digunakan untuk melihat dan menganalisis proses formulasi kebijakan berbasis jaringan. Berikut ini adalah dimensi-dimensi jaringan kebijakan yang dimaksud:

1. *Actors* (aktor)

Dalam perumusan kebijakan, aktor berkaitan dengan jumlah orang yang terlibat (*participants*). Aktor ini menentukan ukuran dari jaringan yang akan dibangun. Selanjutnya karakteristik jaringan kebijakan akan dipengaruhi oleh tipe aktor yang terlibat. Aktor dalam jaringan kebijakan merupakan individu namun dapat juga berupa organisasi sebagaimana aktor yang terlibat dapat juga sebagai representasi dari kelompok/pihak tertentu.

2. *Function* (fungsi)

Jaringan adalah media komunikasi yang berwujud dalam beberapa fungsi. Fungsi-fungsinya bergantung pada kebutuhan, niat, sumber daya, dan strategi para aktor-aktor yang terlibat. Konsep “fungsi” ini kemudian membentuk penghubung perspektif antara struktur dan aktor di dalam jaringan. Fungsi utama *policy network* adalah sebagai *tools* yang digunakan untuk meningkatkan intensitas hubungan (*relationship*) antara pihak-pihak yang berkepentingan terhadap suatu kebijakan publik baik pada tahapan formulasi maupun implementasi.

3. *Structure* (struktur)

struktur jaringan kebijakan merujuk pada pola hubungan antar aktor-aktor yang terlibat.

4. *Institutionalization* (pelembagaan)

Tingkat pelembagaan merujuk pada karakteristik formal jaringan dan stabilitasnya. Hal ini akan bergantung pada bentuk/karakteristik struktur jaringan dan semakin tinggi tingkat pelembagaan sebuah jaringan, semakin efektif pula jaringan kebijakan tersebut.

5. *Rules of conduct* (aturan bertindak)

Jaringan selanjutnya dibentuk oleh kebiasaan atau aturan main (*rules of the game*) dalam interaksi yang mengatur pertukaran (*exchange*) dalam suatu jaringan. Hal ini bersumber dari persepsi peran (*role perception*), sikap (*attitudes*), kepentingan (*interest*), dan latar belakang social dan pendidikan (*social and intellectual-educational background*) para aktor yang terlibat.

6. *Power relations* (hubungan kekuasaan)

Salah satu karakteristik utama dari jaringan kebijakan adalah *power relation* yang dapat dipahami melalui pengamatan terhadap pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Proses ini berwujud fungsi distribusi sumber daya (*resources*) dan kebutuhan (*needs*) di antara aktor-aktor dan antara struktur-struktur organisasi ketika yang terlibat adalah organisasi.

#### 7. *Actor strategies* (strategi aktor)

Dalam jaringan kebijakan, aktor-aktor menggunakan *network* sebagai strategi untuk mengatur saling ketergantungan mereka. Mereka menciptakan atau menggunakan jaringan untuk memperoleh kebutuhan, kepentingan, dan tujuannya. Model jaringan yang dikemukakan oleh Frans Van Waarden (1992) adalah model jaringan yang akan menjawab pertanyaan terkait jaringan kebijakan para aktor yang berperan dan menjalankan fungsinya dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai pada percepatan penurunan stunting di Kabupaten Maros.

#### 4. Kebijakan Publik

Dari pembahasan dimensi-dimensi proses kebijakan, selanjutnya hal yang penting diketahui yaitu terkait definisi kebijakan publik itu sendiri. Kebijakan publik, dilihat dari perspektif instrumental, adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai kepublikan (*public values*). Namun secara umum kebijakan publik adalah alat untuk mewujudkan nilai-nilai yang diidealkan masyarakat seperti keadilan, persamaan, dan keterbukaan. Memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat misalnya masalah kemiskinan,

pengangguran, kriminalitas, dan pelayanan publik yang buruk. Memanfaatkan peluang baru bagi kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat seperti mendorong investasi, inovasi pelayanan, dan meningkatkan ekspor. Melindungi masyarakat dari praktik swasta yang merugikan misalnya pembuatan undang-undang perlindungan konsumen, ijin trayek, ijin gangguan (Purwanto, 2015: 64).

Selanjutnya David Easton dalam Anggara (2014: 35). "*Public policy is the authoritative allocation of values for the whole society*", kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah atau paksa kepada seluruh masyarakat. Pengertian berikutnya mengenai kebijakan publik dikemukakan oleh George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Suratman (2017: 10-11). "*public policy is what government say and do, or do not do, . It is the goals or purposes of government programs*". Kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah. Disamping itu defenisi "*public policy is a projected program of goals, values and practices*". Kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah merupakan defenisi yang dikemukakan oleh Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan dalam Suratman (2017: 11).

Adapun pendapat dari Chief J.O. Odoji dalam Suratman (2017: 11). "*public policy isan sanctioned couse of action addressed to a particular problem or group of related problems that effect society at large*". Kebijakan publik adalah suatu tindakan yang memiliki sanksi yang mengarah pada

suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang memengaruhi sebagian besar warga masyarakat. Sedangkan pendapat lain oleh Laswell dan Abraham mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu hipotesis yang didalamnya berisi kondisi-kondisi awal dari sebuah aktivitas pemerintah serta akibat yang sudah bisa kita ramalkan dalam artinya kebijakan publik ini merupakan suatu program yang telah terarah (Islamy, 2014:17).

Carl J.Friedrick dalam Suratman (2017:10). "*public policy is a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing abstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or purpose*". Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, sekelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Berikutnya kebijakan publik dikemukakan oleh George C. Edwars III dan Ira Sharkansky dalam Suratman (2017:10-11). "*pubic policy is what government say and do, or do not do,. It is the goals or purposes of government programs*". Kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah.

W.I. Jenkins dalam Suratman (2017:11). "*public policy is a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning*

*the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve*". Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling terkait yang ditetapkan oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi di mana keputusan-keputusan itu pada dasarnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari pada aktor.

Adapun pendapat dari Chief J.O. Odoji dalam Suratman (2017: 11). *"public policy isan sanctioned cause of action addressed to a particular problem or group of related problems that effect society at large"*. Kebijakan publik adalah suatu tindakan yang memiliki sanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang memengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Defenisi William N. Dunn dalam Suratman (2017: 12) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian pilihan tindakan pemerintah (termasuk pilihan tidak bertindak) guna menjawab tantangan-tantangan yang menyangkut kehidupan masyarakat. Kebijakan publik adalah setiap hubungan antara lembaga pemerintah dengan lingkungannya, kebijakan tidak selalu diwujudkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan tertulis, melainkan juga setiap tindakan pemerintah.

Berdasarkan beberapa pandangan para ahli terkait kebijakan publik maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah seluruh tindakan

yang memiliki maksud dan tujuan tertentu, yaitu sasaran dan orientasi pada tujuan. Kebijakan publik merupakan kebijakan yang didasarkan pada aturan hukum yang bersifat memerintah.

## **B. Teori Ketergantungan Sumber Daya**

Teori ketergantungan sumber daya adalah teori yang menyatakan bahwa tujuan suatu organisasi adalah untuk mengurangi ketergantungan pada organisasi lain yang mensuplai sumber-sumber daya dilingkungannya dan berusaha menemukan cara atau strategi untuk memperoleh sumber daya tersebut. Teori ketergantungan sumber daya ini berusaha menghadapi kekuatan lingkungannya dengan menggunakan strategi-strategi proaktif untuk mengakses sumber-sumber daya yang ada di lingkungannya, (Jones 2004; Jaffe 2001; Powers 2001; Beccerra 1999; Gulati & Gargiulo, 1998) Kasmad (2014). Dasar utama dalam teori ketergantungan sumber daya ini adalah mengurangi ketergantungan sumber-sumber daya terhadap organisasi-organisasi lain yang mengendalikan sumber-sumber daya yang dibutuhkan. Dalam sebuah organisasi tidak dapat menjalankan peranannya dalam suatu lingkungan jika tidak menguasai sumber-sumber daya yang sebuah kekuatan untuk berkompetisi dalam lingkungan yang tidak pasti.

Organisasi perlu memiliki strategi untuk mengurangi ketergantungannya terhadap sumber-sumber daya yang dikuasai oleh organisasi-organisasi lain melalui jaringan kerjasama antar organisasi. Berdasarkan alasan-alasan pembentukan suatu organisasi jaringan antar organisasi, maka alasan pertama, adanya saling ketergantungan antara



satu dengan yang lainnya. Saling ketergantungan adalah penjelasan yang paling umum digunakan untuk pembentukan hubungan Kerjasama antar-organisasi (Kasmad 2014).

Ketergantungan sumber daya adalah inti dari definisi jaringan kebijakan yang digunakan oleh para ahli jaringan. Jaringan kebijakan di definisikan sebagai sekumpulan aktor politik yang terlibat dalam pertukaran sumber daya atas kebijakan publik (keputusan kebijakan) sebagai konsekuensi dari saling ketergantungan sumber daya. Ini adalah definisi yang cukup sederhana, bahkan tidak memiliki semua elemen yang Brozel masukan dalam enkapsulasi pemahaman umum dari istilah tersebut, tetapi ia memiliki manfaat kejelasan dan terlebih lagi termasuk di dalamnya dan ini sangat penting dinamika kausalnya sendiri, yaitu ketergantungan aktor politik pada satu sama lain untuk sumber daya yang mendorong mereka untuk terlibat dalam pertukaran sumber daya atas kebijakan publik. Artinya definisi tersebut bukan hanya deskripsi sederhana dari jenis aktor politik tertentu. Definisi ini juga mengartikan bahwa pendorong penyebab yang menghasilkan jaringan kebijakan dan memotivasi tindakan lebih lanjut dari anggotanya, setidaknya sebagian. Ini, seperti yang kita lihat, memiliki implikasi yang luas untuk analisis perubahan kebijakan, (Kasma, dkk. 2018).

Ketergantungan sumber daya pada organisasi lain perlu dikelola dengan baik, dan dalam melakukan hal ini, pertama-tama suatu organisasi harus mempengaruhi organisasi lain untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan. Kedua, suatu organisasi harus merespon kebutuhan dan

tuntutan organisasi lain di lingkungannya. Selanjutnya, tingkat ketergantungan organisasi pada sumber daya tertentu merupakan fungsi dari dua faktor yaitu pertama, seberapa penting sumber daya dalam keberlangsungan organisasi, dan kedua, sejauh mana organisasi tersebut dikenal oleh organisasi lain (Jones, 2014).

Hubungan relasional antar berbagai aktor baik individu maupun kolektif ini utamanya disebabkan adanya ketergantungan terhadap sumber daya (Menzel, 1987). Umumnya organisasi berusaha untuk mereduksi ketidakpastian (*organizational uncertainties*) yang mereka hadapi dengan cara menjalin relasi-relasi dengan pihak lain Thompson (1967). Hal ini menyebabkan konsep jaringan memiliki keunggulan mengatasi problem kelangkaan sumber daya yang merupakan salah satu bagian dari ketidakpastian yang dihadapi organisasi-organisasi.

Oleh karena itu, suatu organisasi memerlukan strategi untuk mengurangi ketergantungan sumber daya yang dikuasai oleh organisasi lain melalui jaringan atau Kerjasama antar organisasi. Hodge dan Anthony (1988) menyatakan ada delapan kondisi atau alasan yang dapat mendorong suatu organisasi untuk membentuk hubungan kerja dengan organisasi lain, yang meliputi yaitu 1) *Cost benefit (inducement-controbution)*; 2) *Power*; 3) Kelangkaan Sumber Daya atau Gangguan Kinerja; 4) Reakti terhadap Gol Super Ordinat atau Kekuatan Luar; 5) Kondusivitas Struktural Lingkungan; 6) Permeabilitas Batas; 7) Tujuan Organisasi; dan 8) Peluang Bekerjasama. Teori ketergantungan

bergantung pada pentingnya menentukan strategi jaringan untuk mendapatkan sumber daya.

### **C. Tahap-Tahap Perumusan Kebijakan**

Proses perumusan kebijakan public adalah proses yang sangat kompleks karena mengikutsertakan banyak proses maupun vertical yang harus dikaji. Oleh sebab itu, beberapa ahli politik khususnya pada kebijakan public, membagi proses pembuatan kebijakan public kebeberapa tahap untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan public. Tahap-tahap kebijakan public menurut Dunn (1999: 24-25) adalah sebagai berikut:

#### **a. Tahap penyusunan agenda**

Pejabat-pejabat yang dipilih memasukkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya, masalah-masalah ini berkompetisi agar dapat masuk dalam agenda kebijakan. Hingga, beberapa masalah masuk kedalam agenda kebijakan di perumusan kebijakan. Pada tahap ini, beberapa masalah mungkin tidak disinggung sama sekali, sedangkan masalah lain ditetapkan sebagai fokus pembahasan, atau ada juga masalah yang ditunda karena alasan tertentu untuk waktu yang lama.

#### **b. Tahap formulasi kebijakan**

Masalah yang masuk ke dalam agenda kebijakan selanjutnya dibahas dan didefinisikan oleh para pembuat kebijakan, untuk dicari penyelesaian masalah terbaik. Penyelesaian masalah diambil dari berbagai pilihan atau alternatif kebijakan yang ada. Masing-masing opsi bersaing agar dapat terpilih sebagai kebijakan yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah.

c. Tahap adopsi kebijakan

Dari sejumlah alternatif kebijakan yang ada, nantinya salah satu pilihan kebijakan itu akan di adopsi dari consensus antara direktur Lembaga, dukungan mayoritas legislative, atau keputusan peradilan.

d. Tahap implementasi kebijakan

Suatu kebijakan dalam hal ini program hanya akan jadi catatan jika tidak diimplementasikan. Jadi keputusan kebijakan yang telah diambil sebagai pilihan penyelesaian masalah harus diimplementasikan, yaitu dijalankan atau direalisasikan oleh instansi-instansi ataupun perwakilan-perwakilan pemerintah di tingkat bawah.

e. Tahap evaluasi kebijakan

Tahap ini kebijakan yang telah direalisasikan dinilai atau dievaluasi, guna mengetahui sejauh mana kebijakan yang dibuat mampu menyelesaikan masalah.

#### **D. Masalah *Stunting***

Secara global, masalah *stunting* sering terjadi di negara berkembang. Pada tahun 2019, sebanyak 144 juta anak usia di bawah 5 tahun mengalami *stunting*, 47 juta anak *wasting* dan 38 juta anak *overweight*. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Balita Terintegrasi (SSGBI) oleh Balitbangkes Kemenkes Republik Indonesia tahun 2019, diketahui bahwa proporsi *stunting* tertinggi terdapat di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Hasil ini hampir sama dengan Riskesdas tahun 2018, di mana proporsi *stunting* tertinggi ada di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Aceh. Untuk proporsi *stunting*

terendah menurut SSGBI 2019 ada di Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Bali, menurut Riskesdas 2018 terdapat di Bali, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta. Penurunan angka *stunting* telah dinyatakan sebagai program prioritas Nasional. Program pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, menetapkan target angka *stunting* nasional agar bisa turun mencapai 14 % (Profil Kesehatan, 2021).

Namun pada tahun 2020 sampai sekarang masalah gizi masih menjadi faktor utama terjadinya *stunting* dan *wasting*, apalagi dimasa pandemi ini mengalami peningkatan prevalensi lebih tinggi hampir di semua daerah yang terkonfirmasi kasus Covid-19. Faktor penyebab yang mendasari terjadinya masalah gizi tersebut adalah penurunan ketersediaan/akses pangan di tingkat masyarakat dan tingkat rumah tangga serta faktor ekonomi, di mana masyarakat agak kesusahan dalam mendapatkan makanan. Situasi ini tentunya berdampak terhadap kondisi kesehatan masyarakat, terutama pada kelompok rentan seperti ibu dan anak. Pada masa pandemi Covid-19, pelayanan gizi lebih diprioritaskan untuk kelompok rentan, terutama balita, ibu hamil serta ibu menyusui (Supatmi, 2021).

Permasalahan *stunting* terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru akan terlihat ketika anak sudah menginjak usia dua tahun. Bagi UNICEF, *stunting* didefinisikan sebagai persentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan, dengan tinggi badan di bawah minus (*stunting* sedang dan berat) dan minus tiga (*stunting* kronis), hal ini diukur dengan menggunakan standar

pertumbuhan anak yang dikeluarkan oleh WHO. Selain mengalami pertumbuhan terhambat, *stunting* juga kerap kali dikaitkan dengan penyebab perkembangan otak yang tidak maksimal. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mental dan belajar tidak maksimal, serta prestasi belajar yang buruk. Selain itu, efek jangka panjang yang disebabkan oleh *stunting* dan kondisi lain terkait kurang gizi, acap kali dianggap sebagai salah satu faktor risiko diabetes, hipertensi, obesitas dan kematian akibat infeksi.

Anak tergolong *stunting* apabila panjang atau tinggi badan menurut umurnya lebih rendah dari standar nasional yang berlaku (Bappenas, 2019). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 tahun 2020, Indeks Panjang Badan terhadap usia (PB/U) atau tinggi badan terhadap usia (TB/U) dapat mengidentifikasi anak-anak yang pendek (*stunted*) atau sangat pendek (*severely stunted*). Anak usia 0-60 bulan dikatakan sangat pendek (*severely stunted*) jika PB/U atau TB/U berada di bawah minus 3 SD, dan dikatakan pendek (*stunted*) jika PB/U atau TB/U berada antara -3 hingga -2 (minus 3 hingga minus 2) standar deviasi.

Dampak *stunting* umumnya terjadi karena diakibatkan oleh kurangnya asupan nutrisi pada 1.000 hari pertama anak. Hitungan 1.000 hari di sini dimulai sejak janin sampai anak berusia 2 tahun. Jika pada rentang waktu ini, gizi tidak dicukupi dengan baik, dampak yang ditimbulkan memiliki efek jangka pendek dan efek jangka panjang. Gejala *stunting* jangka pendek meliputi hambatan perkembangan, penurunan fungsi kekebalan, penurunan fungsi kognitif, dan gangguan sistem pembakaran.

Sedangkan gejala jangka panjang meliputi obesitas, penurunan toleransi glukosa, penyakit jantung koroner, hipertensi, dan osteoporosis. Oleh karena itu, upaya pencegahan baiknya dilakukan sedini mungkin. Pada usia 1.000 hari pertama kehidupan, asupan nutrisi yang baik sangat dianjurkan dikonsumsi oleh ibu hamil. Tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan nutrisi dirinya, asupan nutrisi yang baik juga dibutuhkan jabang bayi yang ada dalam kandungannya.

Mengacu pada “*The Conceptual Framework of the Determinants of Child Undernutrition*”<sup>5</sup>, “*The Underlying Drivers of Malnutrition*”<sup>6</sup>, dan “Faktor Penyebab Masalah Gizi Konteks Indonesia”<sup>7</sup> penyebab langsung masalah gizi pada anak termasuk *stunting* adalah rendahnya asupan gizi dan status kesehatan. Penurunan *stunting* menitikberatkan pada penanganan penyebab masalah gizi, yaitu faktor yang berhubungan dengan ketahanan pangan khususnya akses terhadap pangan bergizi (makanan), lingkungan sosial yang terkait dengan praktik pemberian makanan bayi dan anak (pengasuhan), akses terhadap pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan pengobatan (kesehatan), serta kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya sarana air bersih dan sanitasi (lingkungan). Keempat faktor tersebut mempengaruhi asupan gizi dan status kesehatan ibu dan anak. Intervensi terhadap keempat faktor tersebut diharapkan dapat mencegah masalah gizi, baik kekurangan maupun kelebihan gizi (Sulistianingsih & Sari, 2018).

Survei daring menunjukkan bahwa kebutuhan pangan semakin tidak aman: 36 % dari responden menyatakan bahwa mereka “sering kali”

mengurangi porsi makan karena masalah keuangan (UNICEF, 2020). Hilangnya pendapatan rumah tangga meningkatkan risiko anak mengalami kurus dan kekurangan zat gizi mikro padahal hal tersebut sangat membahayakan. Risiko kematian pada anak *stunting* hampir 12 kali lipat lebih tinggi daripada risiko kematian pada anak dengan gizi baik. Anak-anak yang pulih dari gizi buruk mungkin akan terus mengalami masalah perkembangan dan pertumbuhan selama hidupnya (UNICEF, 2020).

Dalam hal ini peran pemerintah baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan serta Desa di harapkan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021, mampu menjalankan setiap tupoksi serta mampu berkoordinasi dalam membantu percepatan penurunan angka *stunting*, sesuai dengan arahan dari Presiden bahwa yang menjadi pelaksana dalam menangani atau mengikat kendali atas pencegahan *stunting* yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan.

Sesuai data RPJMD Kabupaten Maros bahwa jumlah kasus *stunting* di Kecamatan Turikale terdapat 630 balita. Penyebab meningkatnya jumlah *stunting* di Kabupaten Maros yaitu partisipasi masyarakat untuk membawa anaknya ke posyandu juga meningkat. Sehingga yang dilakukan pemeriksaan semakin meningkat pula. Sebelumnya, dinilai rendah karena salah satu faktor penyebabnya yaitu pandemi (virus covid-19) sehingga masyarakat enggan membawa anaknya memeriksa ke posyandu.



Sehingga semakin banyak yang diperiksa, maka semakin banyak yang kasus yang di temukan. Untuk mempercepat penurunan *stunting* maka seluruh masyarakat berkolaborasi dengan melaksanakan pencegahan dari awal seperti, semua balita agar rutin dibawa ke posyandu minimal satu kali dalam sebulan untuk mengukur tumbuh kembang dan berharap masyarakat tetap menjaga kebersihan lingkungan dan air bersihnya.

Berdasarkan hasil penelusuran lapangan pada kunjungan masyarakat terhadap kegiatan posyandu masih rendah, sehingga pelaksanaan kegiatan dilakukan secara home visit kerumah warga. Disertai dengan masalah sosiologis masyarakat seperti kurangnya pengetahuan ibu, berubahnya pola relasi keluarga dalam mengasuh anak, kepercayaan terhadap mitos, hilangnya perhatian lingkungan terhadap ibu hamil, masih kurang partisipasi masyarakat, dan masih rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan.

#### **E. Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting***

Dalam pelaksanaan program atau kebijakan pemerintah dalam penurunan *stunting* di Kabupaten Maros sangat diperlukan adanya kerjasama dari semua actor yang terlibat dalam program yang sedang dijalankan. Pada saat ini Pemerintah Kabupaten Maros dalam penanganan percepatan penurunan *stunting* yaitu Bupati Maros membuka kegiatan penguatan kemitraan Kampung KB dalam rangka percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Maros. Kegiatan ini digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3ADALDUK KB) bekerjasama dengan

BKKBN, jumlah Kampung KB di Kabupaten Maros yaitu 24 Kampung KB dan belum merata setiap Kelurahan/Desa. Pemerintah Kabupaten Maros akan terus berupaya agar seluruh Kelurahan/Desa se-Kabupaten Maros memiliki Kampung KB.

Dilanjutkan dengan salah satu program yang dilakukan yaitu sebuah inovasi untuk percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Maros adalah Dapur Sehat Atasi *Stunting* (DAHSAT), program DAHSAT ini merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kelurahan/Desa sebagai upaya pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga beresiko *stunting*. Tujuan BKKBN melaksanakan program DASHAT ini di sejumlah daerah untuk melawan pencegahan *stunting* (kekerdilan) di Indonesia. Dengan harapan teruntuk ibu hamil, ibu yang mau hamil, ibu yang baru menyusui, semua bisa dapat perhatian untuk mendapatkan nutrisi produk olahan dari DAHSAT ini. Program DAHSAT ini akan memberikan makanan yang berasal dari bahan pangan lokal yang bergizi, terjangkau, juga memiliki cita rasa makanan yang sesuai dengan selera para ibu dan bayi, (Sumber BKKBN).

Beberapa program yang dijalankan di Kabupaten Maros tepatnya di Kecamatan Turikale melaksanakan program yang disebut dengan istilah MASAGENA singkatan dari Masyarakat Sadar Cegah *Stunting* dengan beberapa program yang dijalankan yaitu:

1. MARAJA (Masagena Remaja Sehat)
2. MASSIARA (Masagena Anak Sehat Satu Telur Sehari)
3. MAROS (Masagena Road Show *Stunting*)

4. MA' TANENG (Masagena Pemanfaatan Tanaman Pekarangan)
5. MA'SEDDI (Masagena Sukses Pendidikan Usia Dini)
6. MAEGA GERMAS (Masagena Edukasi Keluarga Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Dalam jaringan kebijakan diperlukan untuk menjawab problem sosial yang bersifat kompleks. Pada perumusan kebijakan pemerintah bukan actor tunggal dalam suatu kebijakan sehingga ator-aktor yang lain diperlukan membangun jaringan dalam berkontribusi pada pemerintah. Berikut dapat diuraikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Gita Susanti, et.al 2017. *Resource Exchange Model in Implementation Network of Fisherman Community Policy in Makassar City. Journal Of Government & Politics*. Vol 8 No 1. February 2017. Yang menjadi tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan model pertukaran sumber daya dalam jaringan implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat nelayan di Kota Makassar, yang meliputi kemampuan ketersediaan sumber daya dan aturan main pertukaran sumber daya. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dan strategi studi kasus. Berdasarkan teknik pola berpasangan, ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan oleh kelompok nelayan belum mencukupi untuk menjalankan usahanya. Hal ini disebabkan oleh sumber pendanaan utama dalam kebijakan ini dari pemerintah pusat. Kemudian, kebijakan pemberdayaan masyarakat nelayan masih

didominasi oleh aturan permainan public sebagai pelaksana kebijakan dalam pertukaran sumber daya. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan sinergitas dengan seluruh pemangku kepentingan dan menetapkan aturan main berbasis jaringan organisasi.

2. Taufik, 2015. Jaringan Kebijakan Publik Studi Kasus Implementasi Kebijakan Syari'at Islam Di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh. Tesis. Universitas Hasanuddin. Penelitian ini mengkaji tentang jaringan kebijakan, dengan menggunakan pandangan dari Scott yang menunjukkan hasil bahwa pertama, pilar regulatif belum berjalan efektif, hal ini karena belum adanya peraturan khusus yang mengatur terkait sanksi, hukum dan kompetensi dalam pelaksanaan tugasnya. Kedua, pilar normatif, sepenuhnya belum bisa dikatakan efektif hal ini dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sumber daya yang ada belum berkompeten yang disebabkan karena penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Pada pilar kognitif, dinilai sudah efektif karena menanamkan keyakinan, tindakan dan tujuan yang selaras dengan semua institusi yang terlibat dalam jaringan pelaksanaan kebijakan.
3. Alwi, 2012. *Network Implementation Analysis On Democratic Public Service. Internasional Jurnal Of Administration Science And Organization, Bisnis dan Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*; Vol. 15, No. 2. May 2012. Penelitian ini menjelaskan terkait jaringan antar organisasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang demokratis studi kasus penyelenggaraan pelayanan angkutan

kota di kota Makassar. Strategi penelitian ini menggunakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Observasi, wawancara, serta analisis dokumen sebagai teknik pengumpulan data yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada jaringan penyelenggaraan pelayanan angkutan ini masih belum efektif, dapat dilihat dari regulasi atau aturan yang ada belum disosialisasikan dengan baik. Komitmen, yang belum tampak dari para aktor. Sumber daya, penggunaan sumber daya yang tidak teratur dan tidak beriringan. Kerjasama, tidak ada pola kerjasama yang nampak dilakukan dalam mendukung pelaksanaan program ini. Koordinasi, dalam pelaksanaan program ini masing-masing pelaksanaan telah menjalankan tugas dan fungsinya. Kolaborasi, belum ada kolaborasi dengan pihak manapun dalam pelaksanaan program. Partisipasi, pemangku kepentingan belum menunjukkan antusiasme atau keterlibatan penuh dalam program ini.

4. Mediansyah. 2015. Jaringan Kebijakan Publik Studi Kasus Implementasi Kebijakan Transportasi Di Kota Makassar. Tesis. Universitas Hasanuddin. Penelitian ini menggunakan studi kasus melalui penelitian kualitatif, dengan melakukan pengamatan dilokasi terkait, wawancara mendalam dengan berbagai aktor jaringan kebijakan yang terlibat di dalamnya, serta mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan program sebagai penunjang hasil penelitian yang akurat. Hasil penelitian ini memerlukan penjelasan terkait batasan-batasan informal, yang masih kurang maksimal disebabkan karena aturan yang telah adalah tidak dijalankan

sebagaimana mestinya, aktor yang terlibat seringkali keluar dari koridor tugas dan fungsinya. Aturan formal, aturan sudah tertata dengan baik namun pelaksana yang tidak berhasil mengikuti aturan. Pematuhan terhadap keduanya menunjukkan dari keduanya tidak ada pematuhan. Biaya transaksi, permasalahan yang ada disebabkan dari kesadaran masyarakat yang masih rendah bukan bersumber dari dana transaksi.

5. Hidayat, et. al 2015. Model Jaringan Kebijakan Publik (Perumusan Kebijakan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang si Kabupaten Bulukumba). Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik. Vol. 1, No. 2, Desember 2015. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis proses jaringan perumusan kebijakan masyarakat adat ammatoa kajang di Kabupaten Bulukumba. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data ditempuh melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelemahan pada jaringan perumusan kebijakan masyarakat adat ammatoa kajang dimana pemerintah daerah mendominasi jumlah aktor pada tim perumus.
6. Permanasari et.al., 2020. Tantangan Implementasi Konvergensi Pada Program Pencegahan Stunting di Kabupaten Prioritas. Jurnal Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Vol. 30, No. 4, Desember 2020. dalam menganalisis hasil penelitian ini yang terdiri dari konten, konteks, proses, dan aktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan dalam implementasi konvergensi ialah masih adanya ego sektoral pada masing-masing OPD karena masih belum optimalnya

sosialisasi sehingga banyak yang belum memahami secara menyeluruh mengenai program pencegahan stunting. Informasi yang terlambat diperoleh, terputusnya informasi dari sosialisasi, serta kondisi demografi wilayah yang sulit menjadi salah satu penyebab pada beberapa daerah tertentu terhadap terhambatnya sosialisasi.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang mengkaji terkait jaringan kebijakan terlihat perbedaan, dimana pada penelitian ini akan menggunakan teori jaringan kebijakan (*policy network*) yang dikemukakan oleh Waarden Frans Van (1992), bahwa ada tujuh variabel kunci menentukan jenis jaringan kebijakan apa yang ada di sektor tertentu yaitu: Aktor, fungsi jaringan, struktur, pelembagaan, aturan bertindak, hubungan kekuasaan, strategi. Dimana dalam teori ini menganalisis terkait peran dan hubungan antar actor yang terlibat dalam percepatan penurunan stunting. Teori tersebut dapat menjelaskan terkait jaringan kebijakan dalam mencapai suatu keberhasilan pada tujuan kebijakan.

Adapun penjelasan secara singkat dari hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan jaringan kebijakan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Hasil Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti</b>	<b>Hasil Penelitian Terdahulu</b>	<b>Penelitian Tesis</b>	<b>Relevansi</b>	<b>Perbedaan</b>
1. Gita Susanti, et.al 2017	Menunjukkan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan oleh kelompok nelayan belum mencukupi	penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan jaringan kebijakan	Penelitian terdahulu dan penelitian ini relevan yaitu sama-sama meneliti	Pada Penelitian terdahulu mengembankan model pertukaran sumber

<b>Peneliti</b>	<b>Hasil Penelitian Terdahulu</b>	<b>Penelitian Tesis</b>	<b>Relevansi</b>	<b>Perbedaan</b>
	untuk menjalankan usahanya. Di sebabkan oleh sumber pendanaan utama dalam kebijakan ini dari pemerintah pusat.	pada percepatan penurunan stunting.	pendekatan jaringan.	daya pada dimensi ketersediaan sumber daya dan aturan main dalam pertukaran sumber daya.
2. Taufik, 2015.	Dari pandangan Scott yang menunjukkan hasil bahwa pertama, pilar regulatif belum berjalan efektif, pilar normatif, sepenuhnya belum bisa dikatakan dan pilar kognitif, dinilai sudah efektif.	penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan jaringan kebijakan pada percepatan penurunan stunting.	Penelitian terdahulu dan penelitian ini relevan yaitu sama-sama meneliti pendekatan jaringan.	Penelitian ini menganalisis permasalahan Jaringan kebijakan publik pada implementasi yang mengkaji tentang jaringan kebijakan Syariat Islam.
3. Alwi, 2012.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pelaksanaan pelayanan public (angkutan kota) antar organizational jaringan tidak efektif.	penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan jaringan kebijakan pada percepatan penurunan stunting.	Penelitian terdahulu dan penelitian ini relevan yaitu sama-sama meneliti pendekatan jaringan.	Penelitian terdahulu menganalisis dimensi dalam jaringan antar organisasi pelayanan publik angkutan kota.
4. Mediansyah, 2015.	Penelitian ini terkait batasan-batasan informal, yang masih kurang	penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan jaringan	Penelitian terdahulu dan penelitian ini relevan yaitu	Penelitian terdahulu menganalisis Jaringan antar organisasi



<b>Peneliti</b>	<b>Hasil Penelitian Terdahulu</b>	<b>Penelitian Tesis</b>	<b>Relevansi</b>	<b>Perbedaan</b>
	maksimal, aturan formal yaitu aturan sudah tertata dengan baik namun pelaksana yang tidak berhasil mengikuti aturan	kebijakan pada percepatan penurunan stunting.	sama-sama meneliti pendekatan jaringan.	dalam pelayanan publik yang demokratis.
5. Hidayat, Et. al. 2015.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelemahan pada jaringan perumusan kebijakan masyarakat adat ammatoa kajang dimana pemerintah daerah mendominasi jumlah aktor pada tim perumus.	penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan jaringan kebijakan pada percepatan penurunan stunting.	Penelitian terdahulu dan penelitian ini relevan yaitu sama-sama meneliti pendekatan jaringan.	Penelitian terdahulu menganalisis proses jaringan perumusan kebijakan.
6. Permana sari et.al., 2020.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan dalam implementasi konvergensi ialah masih adanya ego sektoral pada masing-masing OPD karena masih belum optimalnya sosialisasi sehingga banyak yang	penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan jaringan kebijakan pada percepatan penurunan stunting.	Penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti percepatan penurunan stunting.	Penelitian terdahulu menganalisis tantangan implementasi konvergensi program pencegahan stunting berdasarkan konten, konteks, proses, dan aktor.

Peneliti	Hasil Penelitian Terdahulu	Penelitian Tesis	Relevansi	Perbedaan
	belum memahami secara menyeluruh mengenai program pencegahan stunting.			

Pada penelitian ini terdapat beberapa aktor di dalam jaringan kebijakan yang berinteraksi antara satu dengan yang lainnya dalam upaya pencapaian tujuan, dengan adanya jaringan ini dapat memudahkan antar aktor dalam berinteraksi yang terlibat dalam jaringan kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Maros.

#### **G. Kerangka Konsep**

Keterlibatan beberapa aktor yang saling berhubungan dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Maros merupakan sebuah konsep yang berbasis jaringan. Diketahui bahwa percepatan penurunan angka *stunting* di Indonesia di laksanakan daya upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi penderita *stunting*, berdasarkan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 di dalamnya menegaskan bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mempunyai kewenangan mengatasi permasalahan dari masalah *stunting*.

Percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Maros melibatkan beberapa aktor yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat

Kabupaten/Kota hingga Kelurahan/Desa yaitu memiliki tugas mengkoordinasikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*. Pada Tim tingkat Kabupaten yaitu terdiri atas perangkat daerah dan pemangku kepentingan (termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) sedangkan tim tingkat kelurahan/desa yaitu tenaga Kesehatan (mencakup bidan, tenaga gizi, petugas lapangan keluarga berencana, TP-PKK, Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan unsur masyarakat lainnya). Adapun Pelaksanaan Percepatan Penurunan *stunting* dengan kelompok sasaran yaitu meliputi remaja, calon pengantin, Ibu hamil, Ibu menyusui/melahirkan, dan anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh Sembilan) bulan.

Keterlibatan beberapa aktor yang saling berhubungan dalam pelaksanaan program ini merupakan konsep berbasis jaringan. (Ritzer dan Goodman, 2014) berpendapat bahwa salah satu prinsip dari teori jaringan yaitu analisis ikatan antar aktor di dalam konteks struktur jaringan yang lebih luas untuk sampai pada sasaran jaringan implementasi (cepat dan tepat), mengingat dari berhasil atau tidaknya jaringan kebijakan ini dalam implementasinya akan memberikan dampak krusial bagi indeks pembangunan baik bangsa dan Negara karena akan tampak nyata di kehidupan masyarakat.

Pada penjelasan diatas, maka penulis menggunakan teori jaringan kebijakan yang dikemukakan oleh Waarden Frans Van (1992) yang akan menjelaskan dan memberi batasan bagaimana seharusnya para aktor-aktor bersikap, serta melihat lebih mendalam bagaimana para aktor

memainkan peran mereka masing-masing dalam mencapai tujuan. Teori ini dibagi dalam 7 (tujuh) bagian di antaranya: aktor, fungsi jaringan, struktur, pelembagaan, aturan perilaku, hubungan kekuasaan, dan strategi. Untuk lebih jelasnya, berikut kerangka konsep pada penelitian di bawah ini:

### Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian

#### Kerangka Konsep Jaringan Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Maros

